

RKPD MALUKU TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 5,11 PERSEN



Sumber Gambar : <https://yusranlapananda.wordpress.com/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menargetkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini mencapai 5,11 persen. "Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan, ada beberapa target yang telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,11 persen," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025, di Ambon.

Selain itu, menurut Sekda, target lainnya yang kini sedang dikejar yaitu menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 13,01 - 13,51 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,64 - 6,03 persen, dan Indeks Modal Manusia (*human capital index*) antara 0,52 persen. Oleh sebab itu, Forum Lintas Perangkat Daerah ini merupakan forum untuk melakukan sinkronisasi pelayanan urusan program, maupun kegiatan antar perangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Forum ini juga merupakan forum sinergi prioritas pembangunan daerah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk itu diminta seluruh Pimpinan OPD memahami dan mengikuti isu-isu strategis yang dihadapi dalam menentukan kinerja yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahun 2025," katanya.

Sekda melanjutkan RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 20 tahun ke depan. Untuk mencapai target-target tersebut, Sekda mengatakan, telah menetapkan tema pembangunan RKPD Tahun 2025, yakni Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Beberapa Prioritas Pembangunan Daerah. "Kami sedang memasuki era transformasi menuju Visi Pembangunan Jangka Panjang Maluku dan Indonesia Emas di Tahun 2045, untuk itu RKPD Tahun 2025 menjadi bagian dari tahapan penguatan fondasi transformasi atau tahapan jangka menengah pertama dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045," katanya lagi.

Dengan demikian, Sekda menyatakan, prioritas-prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan bagian integral penguatan fondasi transformasi. "Sesuai arahan Presiden yang

masih menjadi perhatian bersama, yakni pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi, mengentaskan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, serta mengutamakan belanja-belanja produk dalam negeri," ujarnya. Sekda juga mengatakan, untuk itu semua arahan Presiden Joko Widodo ini menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama. "Guna mencapai prioritas pembangunan daerah tersebut bukan hal yang mudah kami harus bersinergi dan bekerja keras dengan seluruh pemangku kepentingan serta membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan," katanya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten II Sekda Maluku, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, serta Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4045275/pemprov-maluku-susun-rkpd-menargetkan-pertumbuhan-ekonomi-511-persen>, 04 April 2024; dan
2. <https://www.kabartimurnews.com/2024/04/05/rkpd-maluku-targetkan-pertumbuhan-ekonomi-511-persen/>, 05 April 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selain RKPD terdapat dokumen perencanaan pembangunan daerah lain yaitu RPJPD dan RPJMD. Dimana, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 memuat (a). rancangan kerangka ekonomi daerah; (b). prioritas pembangunan daerah; (c). rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan (d). hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023. RKPD Provinsi Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2024 dan Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.